

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada era globalisasi saat ini kondisi pemikiran masyarakat semakin kritis, perhatian terhadap jalannya pemerintah pun semakin berkembang. Pemerintah sebagai lembaga hukum, politik, tata negara, sosial, juga bertindak sebagai lembaga ekonomi berperan sebagai pengatur rumah tangga negara yang bergerak didalam roda pemerintahan yang sedang berjalan. Pemerintah harus bertindak lebih bertanggung jawab (akuntabel), transparan, demokratis, adil, bermoral tinggi, dan berhati-hati dalam setiap kebijakan, tindakan, dan pelaksanaan atas kinerja yang akan dihasilkan. Kewajiban yang perlu dilakukan antara lain dengan pengukuran, penilaian, serta pelaporan atas kinerja publik. Konsep akuntabel dalam hal ini adalah bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui hasil dari kinerja yang telah dilakukan dan dicapai oleh aparatur pemerintah. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban perorangan, kelompok, atau suatu organisasi yang diasumsikan harus melaksanakan kewenangan dan/atau pemenuhan tanggung jawab (**Mardiasmo; 2002 : 21**).

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik merupakan instrumen utama untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik (**Mardiasmo; 2002 :159**). Jika dilihat dari sisi internal organisasi, laporan keuangan sektor publik merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban

kepada publik dan sebagai dasar dari pengambilan keputusan (**Bastian; 2006 : 94**). Dalam menjalankan aktivitasnya dan untuk menjamin dilaksanakannya pertanggungjawabannya terhadap publik oleh organisasi sektor publik, maka diperlukan audit terhadap organisasi sektor publik yang bersangkutan (**Mardiasmo; 2002 : 179**).

Audit tersebut dilakukan tidak hanya terbatas pada audit keuangan maupun kepatuhan, tapi dapat dilakukan juga pada audit terhadap kinerja organisasi sektor publik. Tuntutan atas keterbukaan pertanggungjawaban penyelenggaraan negara menyebabkan instansi pemerintah harus bekerja lebih optimal dalam pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Kondisi yang optimal adalah kondisi yang telah tercapai karena penyelenggaraan kinerja oleh instansi pemerintah dapat menghasilkan kinerja yang baik. Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja dan keandalan laporan kinerja sektor publik yang disajikan, maka dibutuhkan audit internal (**Mardiasmo; 2002 : 306**).

Menurut penelitian **Suwarni (2005)**, Peranan Satuan Pengawasan Intern dalam meningkatkan efektivitas pengendalian intern terhadap biaya proyek adalah Satuan Pengawasan Intern telah melaksanakan fungsinya dengan baik yaitu melakukan pemeriksaan dengan tahapan-tahapan audit, seperti perencanaan atau persiapan audit, pelaksanaan pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut. Menurut penelitian **Kholmi (2006)**, Peran dan tanggung jawab audit internal dalam menjalankan tugasnya, dibuktikan dengan adanya:

1. Kecenderungan auditor selalu memperbaiki sikap independensi. Auditor pernah dan selalu mengkomunikasikan hasil audit.

2. Auditor melakukan peningkatan kualitas auditan dengan memperbaiki efektivitas auditan.

Dalam penelitian ini, penulis bermaksud melakukan penelitian di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) adalah organisasi pemerintah yang bertugas mengurus program-program penggalangan dana pemerintah daerah yang dimana hasilnya akan disalurkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk dianggarkan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Peranan auditor internal penting dilakukan untuk mengetahui jika terjadi kecurangan (*fraud*) terhadap pengawasan kinerja internal organisasi. Sehingga kinerja organisasi atau Dinas terkait dalam penggalangan dana untuk RAPBD yang hasilnya disalurkan ke masyarakat Jawa Barat khususnya dapat dilaksanakan juga adanya peningkatan kinerja yang semakin baik.

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang

“Peranan Auditor Internal Terhadap Kinerja Organisasi (di DISPENDA PROVINSI JAWA BARAT)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang, penelitian ini akan membahas permasalahan berupa memadainya audit internal dan hubungannya dengan efektivitas yang dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan audit internal telah dilaksanakan secara memadai?
2. Bagaimana peranan auditor internal terhadap peningkatan kinerja organisasi?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan permasalahan yang telah diidentifikasi. Maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan audit internal telah dilaksanakan secara memadai.
2. Untuk mengetahui peranan auditor internal terhadap peningkatan kinerja organisasi.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi Organisasi:
 - a. penulis berharap penelitian ini bisa menjadi masukan dan evaluasi atas pelaksanaan audit internal.
 - b. Saran dalam rangka peningkatan kinerja organisasi-organisasi sektor publik.
2. Bagi penulis:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh atas peranan auditor internal terhadap kinerja organisasi.
 - b. Memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi di Universitas Kristen Maranatha.
2. Bagi Pembaca: penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan referensi serta menambah atau mengembangkan terhadap judul yang diteliti.